

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SERAPAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG SKPK DI KABUPATEN ACEH TENGAH

THE DETERMINANTS OF AGENCY DIRECT EXPENDITURE ABSORPTION IN ACEH TENGAH REGENCY

Ruhmaini¹, Syukriy Abdullah, dan Zuraida²

¹Pemda Kabupaten Aceh Tengah, ²Dosen FEB Universitas Syiah Kuala

e-mail: syukriyabdullah@unsyiah.ac.id

Diterima: 10 April 2017; direvisi: 15 Mei 2017; diterbitkan: 1 Juni 2017

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh Besaran Anggaran, Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya, dan Perubahan Anggaran terhadap serapan anggaran belanja langsung SKPK di Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunakan 121 sampel SKPK selama 4 tahun anggaran. Data yang digunakan bersumber dari Qanun APBK dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2012-2015. Hasil analisis menunjukkan bahwa Besaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran, sementara Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya dan Perubahan Anggaran berpengaruh signifikan dengan arah negatif.

Kata kunci: Serapan anggaran, besaran anggaran, sisa anggaran tahun sebelumnya, perubahan anggaran, belanja langsung.

ABSTRACT

The objective of this study is to examine the effect of budget size, last year funds balance, and rebudgeting on agency direct expenditure at Aceh Tengah regency. This research used 121 agencies as samples for four years (2012-2015). The result shows that last year funds balance and rebudgeting negatively affected agency direct expenditure, but budget size didn't.

Keywords: *budget absorption, budget size, last year funds balance, rebudgeting, direct expenditure,*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang beriringan dengan penerapan desentralisasi fiskal telah memberikan kewenangan begitu besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri keuangannya, yang terfokus pada penganggaran yang menghasilkan anggaran pendapatan dan belanja

daerah/APBD (Abdullah, et al. 2015). APBD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif, efisien dan ekonomis.

Pelaksanaan APBD berpedoman pada regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah berupa peraturan kepala daerah (Perkada).

Pedoman ini secara implisit merupakan

negatif terhadap serapan dan perubahan anggaran berpengaruh positif terhadap serapan anggaran pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Aceh.

Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Menurut Mayer, et al. (1991) anggaran yang disetujui adalah rencana fiskal awal pemerintah daerah yang kinerjanya diukur melalui varian anggaran (*budget variance*). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan daya serapan anggaran menjadi rendah. Pertama, besaran anggaran (*budget size*) dimana besaran anggaran menunjukkan seberapa besar beban dan tanggung jawab yang diemban pemerintah daerah/SKPD. Semakin besar anggaran pemerintah daerah/SKPD, maka semakin banyak program dan kegiatan yang dilaksanakan, dan hal ini berdampak pada semakin besarnya nilai anggaran yang kemungkinan tidak terserap.

Besaran anggaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) adalah banyaknya belanja dan besarnya beban yang ditanggung oleh SKPD, sesuai dengan kebutuhannya dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk sarana dan prasarana dalam menjalankan kegiatan pemerintahan maupun pelayanan publik dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat (Abdullah, et al. 2014a). Alokasi anggaran belanja daerah didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.

Maksimalisasi anggaran oleh SKPD berimplikasi pada berkurangnya alokasi anggaran untuk SKPD lain yang lebih membutuhkan alokasi tersebut dikarenakan adanya keterbatasan dalam sumber daya yang dimiliki oleh

pemerintah daerah (Abdullah & Nazry, 2014). Menurut Abdullah (2014a), besaran anggaran berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran.

Kedua, sisa anggaran tahun sebelumnya yang merupakan suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. Fenomena pada pemerintah daerah menunjukkan bahwa pada akhir tahun selalu ada anggaran yang tidak terserap di SKPD (*agency*), yang mencerminkan kemampuan SKPD mencapai target kinerja yang sudah ditentukan.

Sisa anggaran merupakan saldo dana pada akhir tahun anggaran yang akan terbawa ke tahun anggaran berikutnya. Sisa anggaran tahun sebelumnya menjadi penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan (Abdullah, 2013a).

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2013:87), pelampauan pendapatan ataupun penghematan belanja pada realisasi APBD sebelumnya akan menghasilkan sisa dana. Sisa dana ini merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai estimasi dari perhitungan APBD sebelum tahun anggaran berakhir. Semakin besar SiLPA, menunjukkan kekurangan cermatan penganggaran atau perencanaan yang kurang baik serta adanya kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. Sehingga rasio SiLPA terhadap belanja menunjukkan porsi belanja yang tertunda atau anggaran yang tidak terserap.

Setiap tahunnya terdapat sisa anggaran di dalam laporan keuangan pemerintah. Sisa anggaran tahun sebelumnya ini dapat digunakan untuk membiayai program-program atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat

didanai dari pendapatan pemerintah ditahun berjalan. Sisa anggaran tahun sebelumnya juga akan menambah beban perintah ditahun berjalan karena akan lebih banyak program/kegiatan yang akan dilaksanakan (Abdullah, et al. 2015).

Abdullah, et al. (2015) menyatakan bahwa sisa anggaran tahun sebelumnya berpengaruh negatif terhadap serapan anggaran. Semakin besar sisa anggaran tahun sebelumnya maka akan menambah beban SKPK, karena sisa anggaran tersebut akan digunakan kembali untuk membiayai kegiatan lanjutan dan juga kegiatan-kegiatan baru yang tidak cukup didanai dari anggaran tahun berjalan, sehingga akan menambah jumlah kegiatan dan program ditahun berjalan.

Ketiga, adanya perubahan anggaran (Forrester 1991; Forrester & Mullins 1992). Perubahan lingkungan dan kebijakan selama pelaksanaan anggaran dalam periode anggaran berkenaan seringkali mengharuskan dilakukannya penyesuaian anggaran (*rebudgeting*) selama periode berjalan. Perubahan anggaran akan menyebabkan pencapaian atas target kinerja anggaran menjadi lebih baik (Anessi-Pessina, et al. 2012).

Perubahan anggaran daerah dilakukan untuk tujuan menyesuaikan anggaran berjalan terhadap perubahan-perubahan terkini, termasuk perubahan dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dari pemerintah pusat (Abdullah & Nazry, 2014). Menurut Annesi-Pessina, et al., (2012), *rebudgeting* adalah proses revisi yang dilakukan pemerintah dalam memperbaharui anggarannya dalam tahun fiskal pelaksanaannya, sehingga berpengaruh besar terhadap alokasi belanja.

Forrester & Mullins (1992) menyatakan 3 (tiga) stimuli perubahan anggaran. Pertama, *managerial necessity*, yang bersumber dari kompleksitas secara teknis dalam pembuatan keputusan manajerial terkait kebutuhan sumber daya,

terutama karena adanya keterbatasan (*constrainst*). Kedua, *environmental pressure*, yaitu penyesuaian karena perubahan lingkungan di mana pelayanan publik diberikan oleh pemerintah. Ketiga, *political concern*, yakni keputusan penyesuaian alokasi sumber daya karena adanya kompromi politik.

Secara empiris, perubahan anggaran berpengaruh positif terhadap serapan anggaran (Abdullah, et al. 2015; 2014b). Penyesuaian anggaran dilakukan agar penggunaan sumberdaya dapat optimal, sehingga lebih efektif dan efisien. Perubahan anggaran juga dapat meningkatkan daya serap anggaran sehingga mencapai 100%, misalnya dalam kondisi pelaksanaan mendahului anggaran. Perubahan ini juga akan mengurangi besarnya varian anggaran karena sisa anggaran yang muncul selama tahun berjalan digunakan kembali sehingga tidak ada lagi dana yang “menganggur”.

METODE

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh SKPK yang ada di kabupaten Aceh Tengah yang berjumlah 46 SKPK. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, kriteria untuk dijadikan sampel adalah SKPK yang memiliki jumlah pagu relatif besar dan SKPK yang memiliki data lengkap untuk APBD murni, APBD perubahan dan sisa anggaran tahun sebelumnya, terutama pada SKPK yang mengalami perubahan/baru dibentuk berdasarkan qanun Kabupaten Aceh Tengah. Sampel yang dipilih mencakup 121 SKPK untuk 4 (empat) tahun anggaran.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang telah tersedia dalam dokumen Qanun APBK dan

Laporan Pertanggungjawaban APBK Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2015.

Operasionalisasi Variabel

Pengujian dan analisis data dilakukan dengan metode regresi linear berganda dengan persamaan regresi berikut: $Y_{it} = a + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + b_3X_{3it} + e$ dengan Y_{it} adalah Serapan Anggaran i pada tahun t, yang diukur dengan menggunakan angka persentase jumlah realisasi belanja langsung SKPK terhadap anggaran belanja langsung SKPK setelah perubahan; a adalah konstanta; b_1 , b_2 , dan b_3 adalah koefisien regresi; X_{1it} adalah Besaran Anggaran i pada tahun t, yang diukur dengan menggunakan angka persentase total belanja SKPK revisian terhadap total belanja pemerintah daerah; X_{2it} adalah sisa anggaran tahun sebelumnya i pada tahun t, yang diukur dengan menggunakan angka persentase

selisih antara total belanja SKPK tahun lalu dengan total belanja yang terealisasi terhadap total belanja SKPK setelah perubahan tahun lalu; X_{3it} adalah perubahan anggaran i pada tahun t, yang diukur dengan menggunakan angka persentase selisih jumlah anggaran belanja langsung perubahan dengan belanja langsung sebelum perubahan terhadap total belanja murni SKPK; dan e adalah *error term*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi liner berganda dengan variabel bebas terdiri dari Besaran Anggaran (X_1), Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (X_2), dan Perubahan Anggaran (X_3), dan variabel terikat (Y) berupa Serapan Anggaran. Adapun hasil pengujian regresi adalah sebagai berikut:

$Y_{it} = 97,024 + 0,069X_{1it} - 0,425X_{2it} - 0,323X_{3it} + e$				
<i>Sig-value</i>	0,000	0,597	0,006*	0,000*
<i>t-value</i>	79,922	0,531	-2,789	-5,524
<i>F-value/Sig.value</i>	12,370/0,000			
<i>R/R²</i>	0,491/0,241			

*Signifikan pada $\alpha=1\%$.

Berdasarkan regresi linear berganda diperoleh nilai F (*F-value*) sebesar 12,370 dengan besaran nilai *probability value* atau *Sig.value* sebesar 0,000 dan koefesien korelasi/determinasi masing-masing 0,491/0,241. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi ini dapat dipakai untuk memprediksi besaran serapan anggaran dengan menggunakan variabel besaran anggaran (X_1), sisa anggaran tahun sebelumnya (X_2) dan perubahan anggaran (X_3).

Pengaruh Besaran Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Belanja Langsung

Koefesien regresi untuk variabel besaran anggaran (X_1) sebesar 0,069 atau

6,9% menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% besaran anggaran, maka secara relatif akan meningkatkan serapan anggaran sebesar 6,9%. Nilai *sig.* sebesar 0,597 menunjukkan bahwa secara statistik variabel besaran anggaran tidak berpengaruh terhadap variabel serapan anggaran belanja langsung pada SKPK di Kabupaten Aceh Tengah.

SKPK yang memiliki anggaran belanja paling besar adalah Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan BLUD RSUD Datu Beru. Kesemua SKPK ini memiliki serapan anggaran belanja yang sudah cukup baik, yakni di atas 95%. Serapan anggaran belanja langsung SKPK di Kabupaten Aceh Tengah berfluktuasi

antartahun, dengan kecenderungan serapan anggaran rendah di awal dan tinggi di akhir tahun anggaran.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2014a), Triana (2016) dan Alasa (2016) yang menyatakan bahwa besaran anggaran berpengaruh terhadap perubahan anggaran, yang menyatakan bahwa semakin besar anggaran semakin besar kemungkinan terjadinya perubahan anggaran yang akan mencerminkan tanggung jawab dan beban SKPK yang semakin besar, sehingga tingkat keakuratan penganggaran juga akan semakin rendah, hal ini dapat menimbulkan terjadinya keterlambatan dalam merealisasikan anggaran belanja.

SKPD di pemerintahan (*agency*) memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan alokasi anggaran pengeluaran. Alokasi anggaran yang besar akan memudahkan SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya karena memberi keleluasaan untuk membuat kebijakan dalam membiayai program dan kegiatannya (Abdullah, 2013b). Namun maksimalisasi anggaran oleh SKPK ini belum tentu dapat menggunakan anggaran dengan baik dan menghasilkan output sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pengaruh Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya Terhadap Serapan Anggaran Belanja Langsung

Hasil pengolahan data penelitian diperoleh koefisien regresi untuk variabel sisa anggaran tahun sebelumnya (X_2) sebesar -0,425, artinya setiap kenaikan 1% sisa anggaran tahun sebelumnya, maka secara relatif akan mempengaruhi serapan anggaran sebesar -42,5%. Dan dengan nilai Sig sebesar 0,006, maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik variabel sisa anggaran tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap variabel serapan anggaran belanja langsung SKPK

di Kabupaten Aceh Tengah dengan arah negatif. Artinya, semakin besar sisa anggaran tahun sebelumnya maka akan menyebabkan turunnya serapan anggaran belanja langsung SKPK di Kabupaten Aceh Tengah.

Besar kecilnya sisa anggaran ditentukan oleh kemampuan Pemerintah daerah dalam mengestimasi pendapatan dan belanja, dan kemampuan SKPK dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Tidak selalu sisa anggaran yang berasal dari kegiatan yang telah selesai 100% digambarkan sebagai efisiensi, tetapi bisa juga diartikan sebagai ukuran besarnya penggelembungan anggaran yang dilakukan oleh SKPK (*agency* sebagai *budget maximizer*). Adanya asimetri informasi antara SKPK dengan TAPD dan/atau kepala daerah menyebabkan SKPK berperilaku oportunistis.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Abdullah, et al. (2015) yang mengindikasikan bahwa besaran sisa anggaran tahun sebelumnya memiliki dampak negatif terhadap serapan anggaran belanja pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Aceh pada tahun berikutnya. Oleh karena itu, kajian tentang komponen-komponen sisa anggaran tahun sebelumnya dan kaitannya dengan kapasitas SKPK dalam melaksanakan kegiatan harus dibuat dengan baik pada saat penyusunan anggaran, sehingga bisa mengurangi risiko ketidakpastian pencapaian target pada saat pelaksanaan.

Ardhini (2011) menyatakan sisa anggaran tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Selanjutnya Abdullah, et al. (2014a) menyebutkan bahwa peningkatan sisa anggaran tahun sebelumnya pada SKPK akan meningkatkan perubahan anggaran belanja daerah. Oleh karena itu, perubahan anggaran ini akan menjadi semakin baik karena setiap alokasi anggaran yang dilakukan masing-masing

SKPK harus sesuai dengan kepentingan masyarakat, dan sisa anggaran sebelumnya akan dialokasikan ke dalam anggaran belanja tahun fiskal.

Permendagri No. 13/2016 menyebutkan bahwa sisa anggaran dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Implikasi dari keberadaan kegiatan lanjutan adalah semakin meningkatnya beban dan tanggung jawab SKPK pada tahun anggaran berikutnya. Namun, menganggarkan kegiatan yang akan diluncurkan atau menjadi kegiatan lanjutan pada akhir tahun akan menguntungkan SKPK karena SKPK merasa tidak perlu lagi harus menyelesaikan item pekerjaan secara terburu-buru di akhir tahun. Artinya, walaupun tidak bisa selesai di tahun berjalan, tetap bisa dikerjakan pada tahun berikutnya, terutama untuk kegiatan fisik.

Sisa anggaran selalu ada pada setiap SKPK, termasuk di kabupaten Aceh Tengah. Sebagian besar sisa anggaran tahun sebelumnya pada setiap SKPK bersumber dari sisa belanja langsung, terutama dari belanja barang dan jasa. Hal ini menunjukkan masih perlunya pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melakukan perbaikan dalam proses perencanaan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan SKPK. Sejauh ini regulasi dan standar harga barang maupun standar biaya telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Aceh Tengah melalui qanun maupun peraturan kepala daerah agar SKPK dapat melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik. Namun proses perencanaan dan pengelolaan keuangan masih saja mengalami banyak masalah.

Pengaruh Perubahan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Belanja Langsung

Hasil pengolahan data menunjukkan nolai koefisien regresi untuk perubahan anggaran (X_3) sebesar -0,323. Artinya setiap kenaikan 1% perubahan anggaran, maka secara relatif akan mempengaruhi serapan anggaran sebesar -32,3%. Besaran nilai *Sig* sebesar 0,000 menunjukkan bahwa secara statistik perubahan anggaran berpengaruh negatif terhadap serapan anggaran belanja langsung pada SKPK di Kabupaten Aceh Tengah. Semakin banyak terjadi perubahan anggaran maka akan menurunkan jumlah serapan anggaran belanja langsung SKPK.

Perubahan anggaran mencerminkan penyesuaian terhadap belanja pada program dan kegiatan sehingga penggunaan dana lebih efisien dan efektif. Hal ini akan meningkatkan serapan anggaran belanja langsung SKPK. Namun perubahan anggaran sering terjadi karena adanya kepentingan pihak-pihak tertentu, hal ini tidak terlepas dari masalah keagenan dalam penganggaran pemerintah daerah (Abdullah & Rona, 2012).

Hasil penelitian Abdullah, et al. (2014b) dan Abdullah, et al. (2015) menyatakan bahwa perubahan anggaran berpengaruh positif terhadap serapan anggaran belanja. Artinya, semakin besar perubahan anggaran semakin tinggi serapan anggaran. Perubahan anggaran sering terjadi dalam bentuk pergeseran anggaran kegiatan, jenis belanja, objek dan rincian belanja. Perubahan juga terjadi akibat dari adanya revisi anggaran pendapatan sehingga merevisi anggaran belanja daerah. Pemerintah kabupaten Aceh Tengah diharapkan untuk dapat membuat kebijakan untuk meminimalisir terjadinya perubahan anggaran dengan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran.

Penetapan Qanun APBK awal atau murni pada pemerintah kabupaten Aceh Tengah setiap tahunnya tidak mengalami keterlambatan, tetapi sebaliknya dengan penetapan Qanun Perubahan APBK. Permendagri No. 13/2006 menyebutkan bahwa persetujuan DPRD terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD paling lambat akhir September tahun anggaran berjalan. Pada tahun 2012 Qanun APBKP disahkan pada tanggal 5 Desember, tahun 2013 tanggal 19 November, tahun 2014 tanggal 27 Nopember, dan tahun 2015 tanggal 1 Oktober. Hal ini diduga memiliki pengaruh terhadap serapan anggaran belanja langsung SKPK.

Agar dana yang dianggarkan dalam perubahan dapat terserap seluruhnya maka penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan perda tentang perubahan APBD harus dihindari. Perubahan anggaran sebaiknya tidak dilakukan menjelang akhir tahun agar belanja dapat terealisasi seluruhnya atau menjadi sisa anggaran yang membebani anggaran tahun berikutnya.

Perubahan juga terjadi karena adanya perubahan regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat, khususnya untuk kegiatan/program yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini disebabkan oleh petunjuk teknis DAK yang terlambat diterbitkan oleh Pemerintah. Akibatnya, perencanaan yang telah dibuat oleh SKPK harus disesuaikan kembali menurut peraturan dari Pemerintah tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi serapan anggaran pemerintah daerah. Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara bersama-sama, Besaran Anggaran, Sisa Anggaran Tahun

Sebelumnya dan Perubahan Anggaran berpengaruh terhadap Serapan Anggaran belanja langsung SKPK di kabupaten Aceh Tengah dari tahun anggaran 2012-2015.

2. Secara sendiri-sendiri Besaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja langsung SKPK di Kabupaten Aceh Tengah. Sementara Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya dan Perubahan Anggaran berpengaruh negatif (signifikan) terhadap belanja langsung SKPK di Kabupaten Aceh Tengah.

Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Menambah beberapa prediktor serapan anggaran lainnya untuk penelitian selanjutnya untuk meningkatkan daya jelas (R^2) model penelitian (dalam penelitian ini nilai R^2 adalah 24,1%). Faktor dimaksud adalah kualitas perencanaan anggaran, sumber daya manusia, proses pengadaan barang/jasa, politik penganggaran, ketersediaan pedoman teknis pelaksanaan anggaran, penetapan pelaksana kegiatan, dan lain-lain.
2. Menambahkan jumlah sampel (SKPD), yaitu dengan melakukan penelitian di luar pemerintah kabupaten Aceh Tengah dan/atau membandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, sekaligus menggunakan data keuangan daerah dengan rentang waktu yang lebih panjang.
3. Penggunaan data primer sebagai tambahan (*mixed methods*), misalnya dengan kuisioner dan wawancara, karena data primer dapat menjelaskan fenomena yang tidak terungkap oleh data sekunder.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel besaran anggaran tidak berpengaruh terhadap serapan

anggaran belanja langsung SKPK. Namun dengan jumlah anggaran yang besar ini akan menambah insentif bagi pelaksana kegiatan, hal ini dapat menimbulkan *mark-up* pada SKPK, sehingga perlu dilakukan analisis oleh Pemda melalui Bappeda tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran di kabupaten Aceh Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukriy. 2012. *Hubungan Keagenan antara Kepala Daerah dan Kepala SKPD - Anggaran SKPD*.

Laman sumber:
<https://syukriy.wordpress.com/2012/11/26/hubungan-keagenan-antara-kepala-daerah-dan-kepala-skpd/> Agustus.

_____. 2013a. *Defisit dan Surplus dalam Anggaran Daerah: Apakah Saling Berhubungan?* Januari 1. Laman sumber:
<https://syukriy.wordpress.com/2013/01/01/defisit-dan-surplus-dalam-anggaran-daerah-apaakah-saling-berhubungan/> Oktober.

_____. 2013b. *Perubahan APBD*. Laman sumber:
<https://syukriy.wordpress.com/2013/04/22/perubahan-apbd/> September.

_____. 2013c. *Sisa anggaran Aceh diperkirakan capai Rp. 2T*. (Online), Laman sumber:
<http://economy.okezone.com/read/2013/02/07/20/758366/2013-sisa-anggaran-aceh-diperkirakan-capai-rp2-t> September.

_____. & Ramadhaniatun Nazry. 2014. *Varian Anggaran*

Pendapatan dan Varian Belanja Daerah: Sebuah Pengantar. Laman sumber:
http://syukriy.wordpress.com/2012/10/16/varian-anggaran-pendapatan-daerah/?relatedposts_exclude=2784. Oktober.

_____. & Riza Rona. 2012. *Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal*. Laman sumber:
http://syukriy.wordpress.com/2012/10/16/varian-anggaran-pendapatan-daerah/?relatedposts_exclude=2784. Oktober.

_____. & Riza Rona. 2014. *Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal*. *Iqtishadia* 7(1): 179-202. Web link:
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/1106>

_____. Yulinda Kusyanti & Nadirsyah. 2014a. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Magister Akuntansi Unsyiah* 3(2): 54-65.

_____. Soraya Lestari & Hasan Basri. 2014b. Pengaruh Alokasi Belanja Murni dan Alokasi Belanja Perubahan terhadap Serapan Anggaran Kabupaten/Kota di Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Unsyiah* 3(3): 80-89.

_____. & Romaidon Darma dan Hasan Basri. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Serapan

- Anggaran Pemerintah Daerah: Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh). *Makalah Dipresentasikan pada Konferensi Ilmiah Akuntansi (KIA) ke-2, IAI KAPD Jakarta-Banten, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jakarta, 25-26 Februari.*
- Ali, Zulfikar Muhammad. 2015. *Tepra*. Laman sumber: <http://setkab.go.id/mengenai-tepra/agustus>.
- Annesi-Pessina, Eugenio, Mariafrancesca Sicilia & Ileana Steccolini. 2012. Budgeting and Rebudgeting in Local Governments: A Siamese Twins? *Public Administration Review* 72(6): 875-884.
- Ardhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan publik dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah). *Skripsi* (tidak Dipublikasikan) Semarang: Universitas Diponegoro.
- Arif, Eliminafe. 2013. Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011. *Tesis* (tidak Dipublikasikan), Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM,.
- Asmara, Jhon Andra. 2010. Analisis Perubahan Alokasi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* 3(2): 155-172.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2011 *Menyoal Penyerapan Anggaran*. Yogyakarta: Paris Review.
- Bernito, Bastida, F. & M.D. Guillamon. 2015. Budget Forecast Deviation in Municipal Government: Determinants and Implications. *Australian Accounting Review* 25(72): 45-70.
- Blais, André & Stéphane Dion. 1990. Are Bureaucrats Budget Maximizers? The Niskanen Model & Its Critics. *Polity* 22(4): 655-674.
- Cornia, Gary C, Ray D. Nelson & Andrea Wilko. 2004. Fiscal Planning, Budgeting, and Rebudgeting Using Revenue Semaphores. *Public Administration Review* 64(2): 164-179.
- Donald R. Cooper & Pamela S. Schindler. 2006. *Bussines Research Methods*. 9th edition. New York: McGraw-Hill Companies Inc.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2013. *Deskripsi dan analisis APBD 2013*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Laman sumber: <http://www.djpk.depkeu.go.id/eb-ook/book/16-deskripsi-dan-analisis-apbd-2013/2-buku> Oktober.
- Eliminafe, Alfrid Daud. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Modal di Kabupaten Rote Ndao. *Tesis* (tidak Dipublikasikan). Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.

- Fahlevi, Heru dan Muhammad Reza Ananta. 2015. Analisis Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Belanja Langsung: Studi pada SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 1(2): 37-44.
- Forrester, John P. 1991. Budgetary Constraints and Municipal Revenue Forecasting. *Policy Sciences* 24(4): 333-356.
- _____. & Daniel R. Mullins. 1992. Rebudgeting: The Serial Nature of Municipal Budgetary Processes. *Public Administration Review* 52(5): 467-473.
- Fozzard, Adrian. 2001. The Basic Budgeting Problem: Approaches to Resource Allocation in the Public Sector and their Implications for Pro-Poor Budgeting. Centre for Aid and Public Expenditure, *Working Paper*. London: Overseas Development Institute.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.
- Heriyanto, Hendris. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta. *Tesis* (tidak dipublikasikan). Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Juliani, Dian & Mahfud Sholihin. 2014. Pengaruh Faktor-faktor Kontekstual terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran terkait Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal akuntansi dan keuangan Indonesia* 11(2): 177-199.
- Kementerian Keuangan. 2014. *Laporan pelaksanaan spending performance dalam mendanai pelayanan publik*. Laman Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/ebook/39-laporan-pelaksanaan-spending-performance-dalam-mendanai-pelayanan-publik/4-publikasi> Januari.
- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TEPRA).
- Kuswoyo, Iwan Dwi. 2011. Analisis Atas Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran: Studi pada Satker di Wilayah KPPN Kediri *Tesis*. (tidak Dipublikasikan) Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada.
- Lee, Tanya M. & Elizabeth Plummer. 2007. Budget Adjustments in Response to Spending Variances: Evidence of Ratcheting of Local Government Expenditures. *Journal of Management Accounting Research* 19: 137-167.
- Malahayati, Cut, Islahudin & Hasan Basri. 2015. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Serapan Anggaran SKPD pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Unyah* 4(1):11-19.

- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mas'ud, M. 2008. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Daya Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember. *Tesis* (tidak Dipublikasikan). Jember: Universitas Jember.
- Miliasih, Retno. 2012. Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekan Baru. *Tesis* tidak Dipublikasikan. Jakarta: FEUI.
- Miller, Gerald J, Donijo Robbins & Jaeduk Keum. 2007. Certification, and Targets in Performance Budgeting. *Public Administration Review* 30(4) (Juni): 469-495.
- Putri, Carlin Tasya. 2014. Faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada SKPD di pemerintah provinsi Bengkulu, *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Priatno, Prasetyo Adi. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satker Lingkup Pembayaran KPPN Blitar, *skripsi*, tidak publikasikan (Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya).
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____. 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
- _____. 2004. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business*, diterjemahkan oleh Kwan Men on (New York: John Wiley & Sons Inc).
- Sekaran, Uma & Roger Bougie. 2010. *Research Method for Bussines A Skill Building Approach*. (5th Edition). United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Simanjuntak, Payaman J, 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*, Edisi ketiga. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Sugianto. 2004. *Analisis Statistika Sosial*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Triana, Yenni. 2016. Pengaruh Sisa Anggaran Tahun Lalu, Perubahan Anggaran Tahun Sebelumnya

dan Besaran Anggaran (*Budget Size*) terhadap Perubahan Anggaran Belanja SKPA pada Pemerintah Aceh. *Tesis* (Tidak Dipublikasikan). Banda Aceh: Unsyiah.